



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN
2024



USER

[blank address]

MASUK



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah diperkenalkan Sistem AKIP suatu sistem manajemen Pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh penggunaan anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, Keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja, Capaian Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2025
Pih, INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALIM, S.Sos., M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19721230 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3 Isu-Isu Strategis	7
1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana.....	9
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporn Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Tujuan,Sarana dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	15
2.1.1 Tujuan.....	15
2.1.2 Sasaran.....	15
2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	21
2.3.1 Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	21
2.3.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung	24
2.4 Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2024	27
2.5 Perjanjian Kinerja	28
2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.a Membandingkan Antara Target dan Realisasi.....	30
3.1.b Perbandingan Capaian Kinerja	33
3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini, dengan Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah	35
3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	36
3.1.e Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative	38
3.1.f Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.1.g Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atauoun Kegagalan	

Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	42
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
3.3 Inovasi.....	46
BAB IV PENUTUP.....	49
Lampiran.....	52
1. Perjanjian Kinerja	
2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang digunakan sebagai bahan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

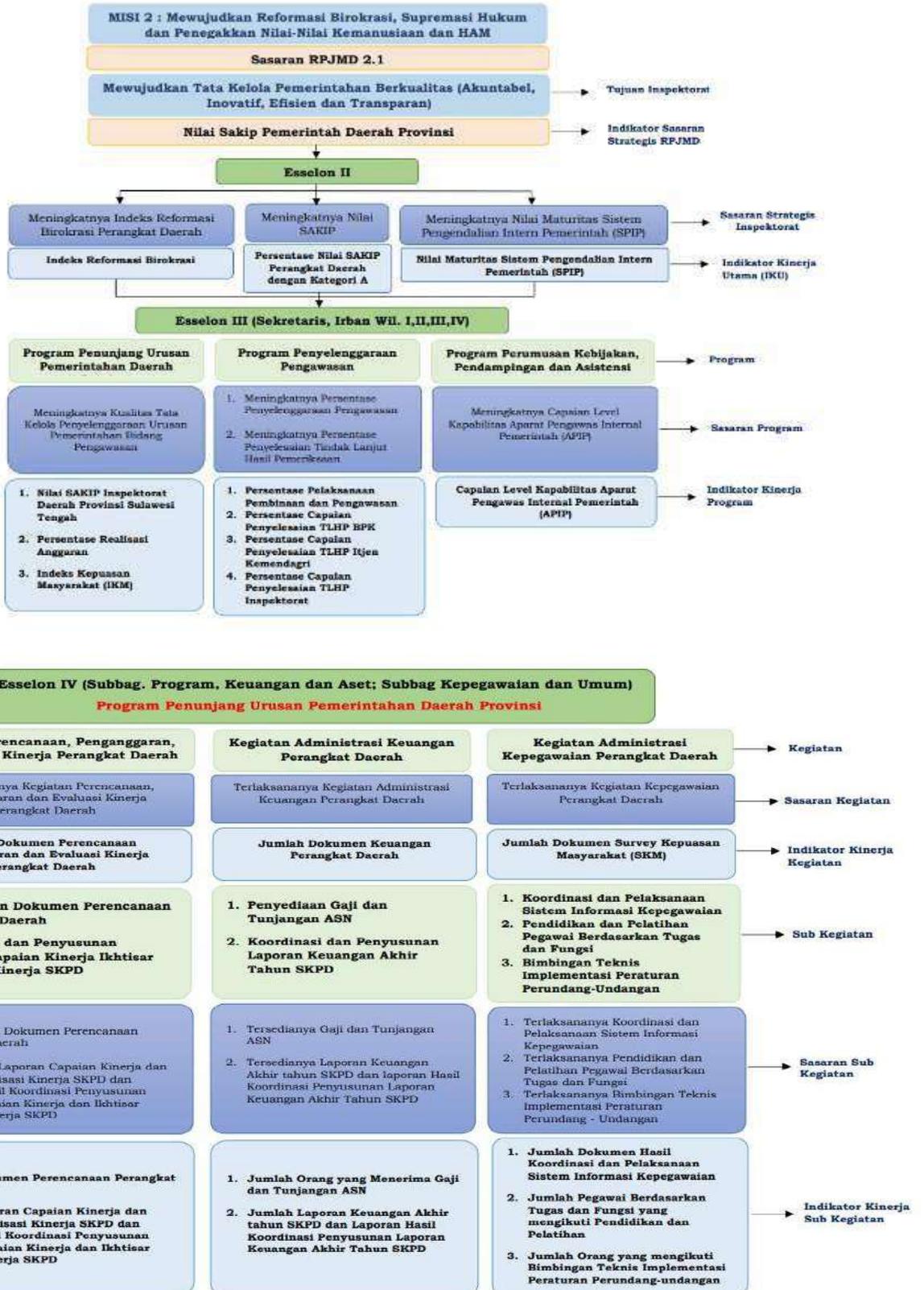
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Daerah Provinsi dan Nasional.

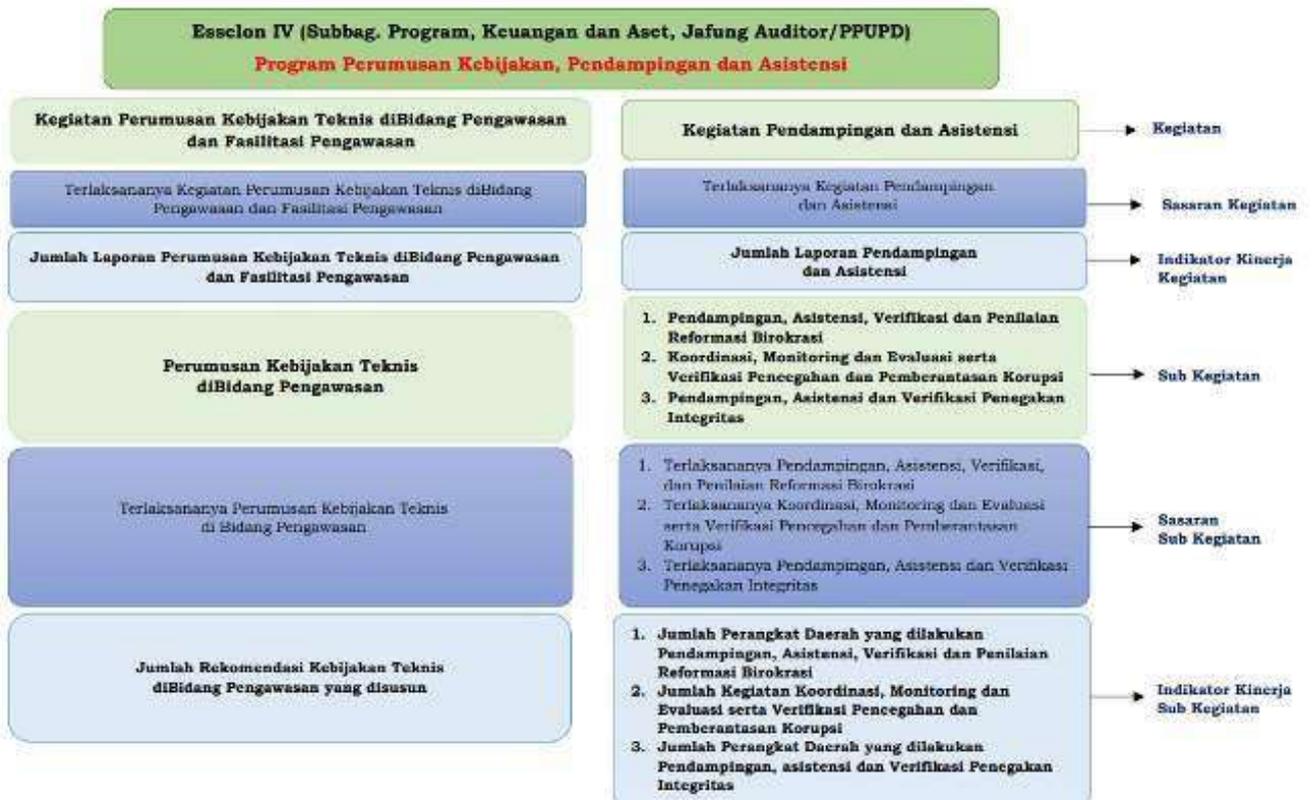
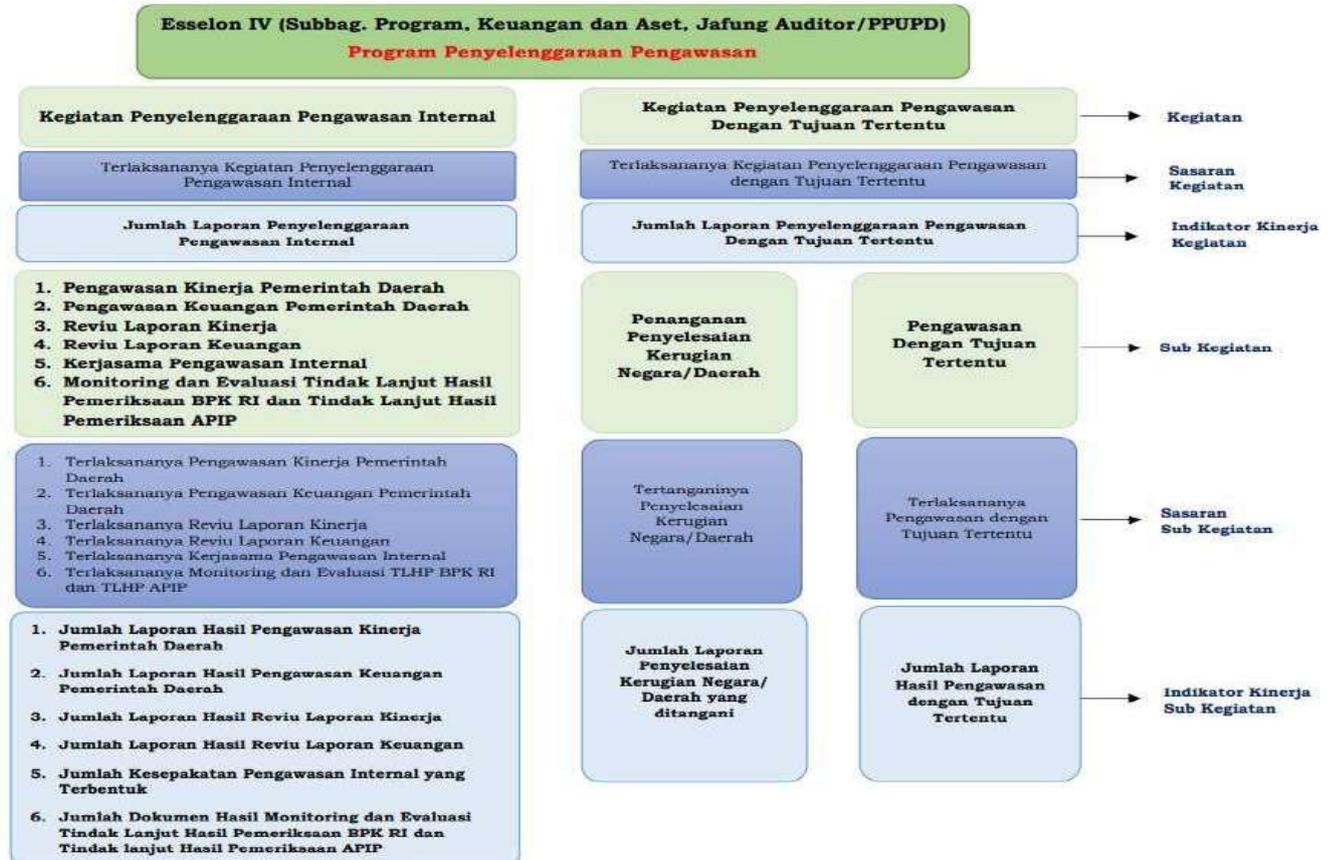
Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Cascading Kinerja

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024





1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 11 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daerah, yakni :

➤ Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

➤ Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan / atau Menteri;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- h. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

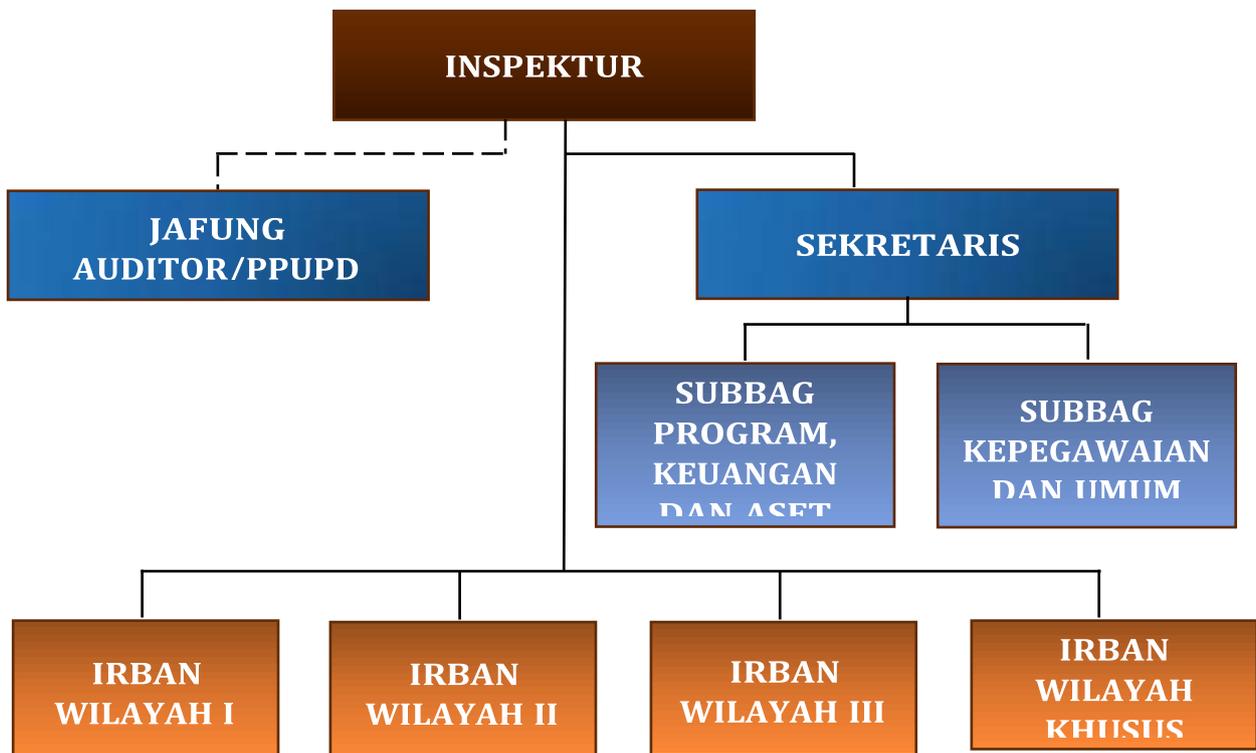
➤ **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

*(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspektorat)*



1.3 Isu – Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh informasi – informasi mengenai berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal dan mencermati aspek – aspek atau faktor-faktor mengenai berbagai peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal dalam kerangka pelaksanaan mandate dan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kespala Daerah.

Dengan menggunakan metode analisis SWOT ini, dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni :

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Ketersediaan sarana/alat pengawasan dan Sumber Daya Manusia	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2. Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independent
3. Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3. Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4. Tingginya animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4. Belum menerapkan system pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Rewaed and Punishment)
5. Penyerapan anggaran yang optimal	5. Kurangnya ketersediaan anggaran pengawasan

PELUANG (Opportinuties)	TANTANGAN (Threaths)
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat	1. Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2. Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraph penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Efektivitas dampak hasil pemeriksaan	3. Jumlah temuan/pelanggaran masih relative tinggi
4. Adanya penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4. Kapabilitas APIP pada level 2 dengan catatan dan sudah harus menuju ke level 3 penuh
5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5. Penyelesaian terhadap kasus pengaduan

➤ **Permasalahan Utama**

Permasalahan utama yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Masih banyaknya temuan-temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK RI), Inspektorat yang belum di tindak lanjuti;
2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di OPD;
5. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP;
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh OPD.

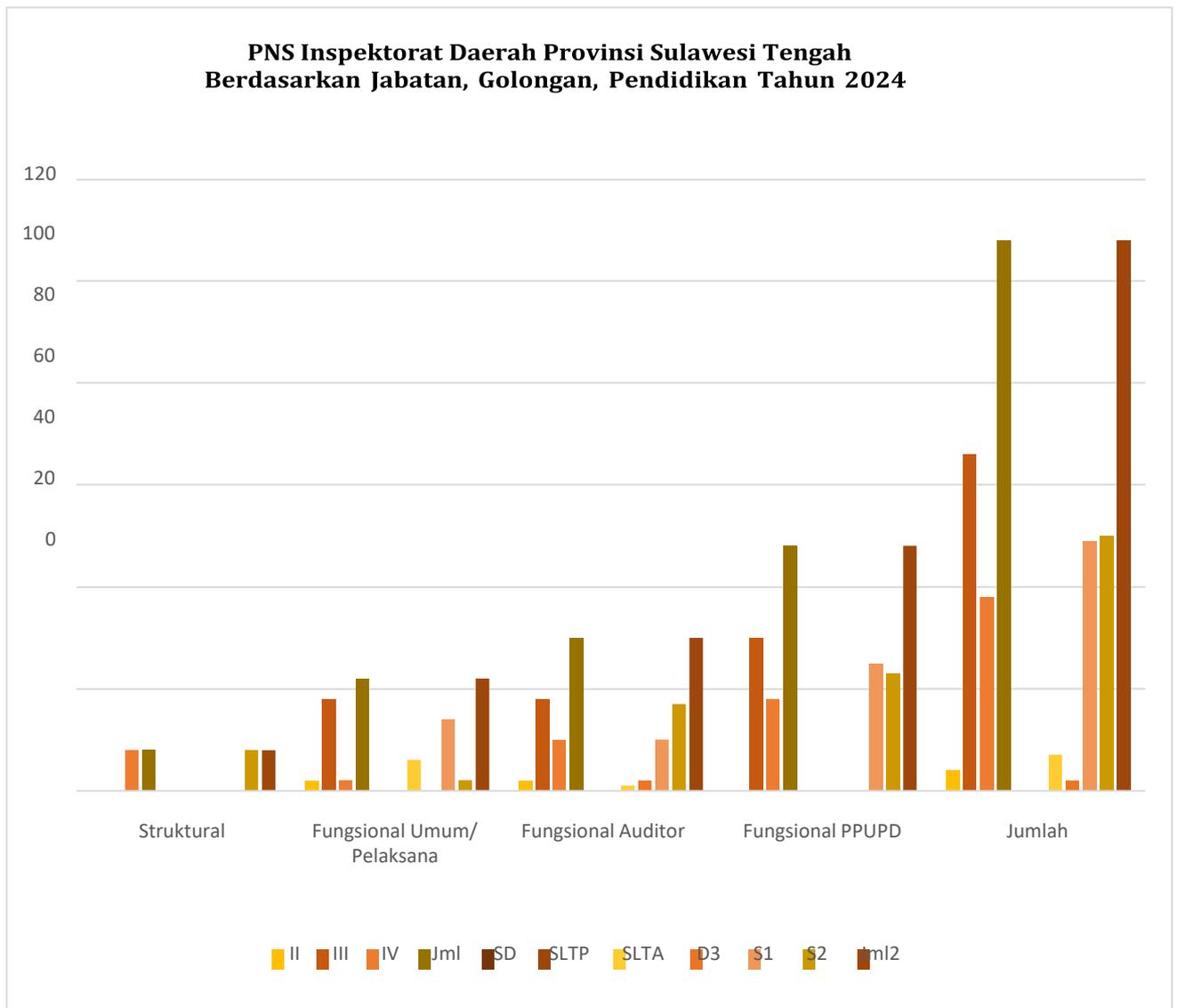
1.4 Dukungan SDM Dan Sarana Prasana

➤ Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut :

Gambar 1.4.1



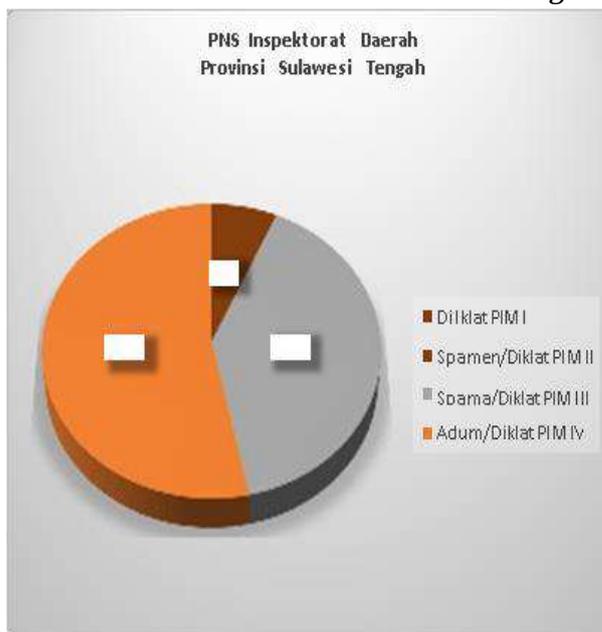
No	Jabatan	Golongan				Pendidikan						
		II	III	IV	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1.	Struktural	-	-	8	8	-	-	-	-		8	8
2.	Fungsional Umum/ Pelaksana	2	18	2	22	-	-	6	-	14	2	22
3.	Fungsional Auditor	2	18	10	30	-	-	1	2	10	17	30
4.	Fungsional PPUPD	-	30	18	48	-	-	-	-	25	23	48
Jumlah		4	66	38	108	0	0	7	2	49	50	108

(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)

Gambar 1.4.2



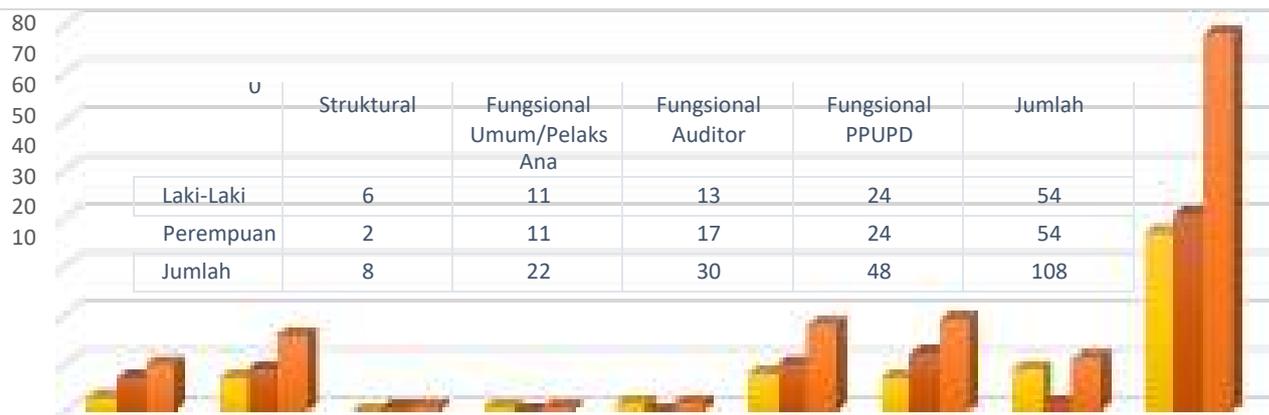
(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2023)



No.	Latihan Penjurangan	Jumlah
1.	Diklat PIM I	0
2.	Spamen/Diklat PIM II	1
3.	Spama/Diklat PIM III	6
4.	Adum/Diklat PIM IV	8
Jumlah		15

Gambar 1.4.4

Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Gender Tahun 2024



(Sumber data: DUK Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024)

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tanah dan Gedung sendiri yaitu Tanah pada tanggal, 31 Desember 1992 dan Gedung pada tanggal 31 Desember 2004 terletak di Jalan Dewi Sartika No. 47 Palu merupakan Jalan Raya Kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Tanah telah bersertifikat seluas 7316 M² Gedung seluas : 216 M² . Adapun Inventaris sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlampir.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan,

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

➤ Uraian Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh skor 82,85 nilai maksimum 100 atau predikat A (Memuaskan) pada tahun 2023 sedangkan hasil Evaluasi pada tahun 2024 belum terealisasi. Adapun hasil penilaian untuk masing- masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, maka rekomendasi kepada Inspektorat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah yakni :

1) Perencanaan Kinerja.

1. Perjanjian kinerja , dalam hal ini indikator harus memenuhi kriteria SMART
2. Perencanaan kinerja dilengkapi dengan crosscutting
3. Merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi
4. Menyusun anggaran dengan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai

2) Pengukuran Kinerja.

1. Menyusun data kinerja yang relevan
2. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
3. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja

3) Pelaporan Kinerja.

1. Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional
2. Menggunakan informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektifitas dengan capaian kinerja dalam laporan kinerja
3. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai

4) Evaluasi Kinerja.

1. Melakukan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman yang memadai
2. Melakukan evaluasi kinerja internal menggunakan teknologi informasi (Aplikasi yang terintegritas) untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi atas kinerja
3. Menyusun hasil evaluasi atas rencana aksi secara tertulis dan menindaklanjuti dalam bentuk Langkah nyata

Dari rekomendasi tersebut di atas, adapun Tindak Lanjut HasilEvaluasi AKIP yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni untuk point :

- 1) Perencanaan Kinerja, dengan melakukan perbaikan pada Dokumen perjanjian kinerja dan indikator yang smart TA. 2024 serta pelaksanaan kinerja dilengkapi dengan crosscutting, merumuskan dan menetapkan rencana kinerja dimana Sekretaris, Irban Wilayah I, II, III, dan Irban Khusus selaku penanggung jawab atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga Menyusun anggaran mengacu pada kinerja yang diinginkan.
- 2) Pengukuran Kinerja, dengan telah Menyusun Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berjenjang dan akan memanfaatkan aplikasi dalam pengumpulan

data kinerja.

3) Pelaporan Kinerja :

- Telah disusun laporan kinerja secara berkala.
- Akan memasukkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dalam laporan kinerja berikutnya.
- Telah Menginformasikan untuk efisiensi dan efektifitas capaian kinerja dalam laporan kinerja
- Telah melakukan publikasi/penyajian informasi pada Website Inspektorat terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

4) Evaluasi Kinerja, dengan :

- Telah dilaksanakannya evaluasi atas kinerja internal pada setiap triwulan.
- Telah dilakukan evaluasi kinerja pada Aplikasi SALIARA yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
- Telah disusun hasil evaluasi atas rencana aksi secara tertulis dan ditindaklanjuti pada evaluasi berikutnya.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan Perangkat Daerah sebagai arah strategis menuju perbaikan sesuai dengan fungsi Perangkat daerah, tujuan tersebut adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan).”**

2.1.2 Sasaran

Dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.1.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) serta mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan output dengan outcome. Sehubungan dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi

program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku APIP telah melaksanakan kegiatan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Secara umum, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai atau mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 yakni :

1. Evaluasi LPPD di Kabupaten;
2. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Pengawasan Umum;
3. Audit Ketaatan Mess Pemda Prov. Sulteng di Jakarta/Audit Pada Badan Penghubung Prov. Sulteng Tengah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta;
4. Audit Ketaatan;
5. Audit Kinerja;
6. Evaluasi SPIP;
7. Evaluasi SAKIP OPD;
8. Evaluasi Manajemen Risiko;
9. Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi;
10. Penyelenggaraan SPM OPD;
11. Pengawasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan;
12. Perhitungan Pelaksanaan Fisik Kegiatan Bencana Alam;
13. Audit Dana BOS di Kabupaten/Kota;
14. Monev Dana Desa di Kabupaten;
15. Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Dana Pokir 2023 di

Kabupaten/Kota;

16. Pemeriksaan BUMD;
17. Evaluasi Penyerapan Anggaran PBJ;
18. Reviu Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
19. Reviu Dokumen Pelaksanaan Dana Pokir 2024 di Kota;
20. Audit Penerimaan Daerah;
21. Reviu Jumlah Penerimaan Pembayaran 50% Tunjangan Hari Raya;
22. Reviu DAK Sub Bidang Kelautan : Pra Kontrak Tahap 1, 2 Tahun 2023, dan Tahap 3 Tahun 2023;
23. Reviu DAK Sub Bidang SMA/SMK/SLB : Pra Kontrak Tahap 1, 2 Tahun 2023,
24. Reviu DAK Fisik Reguler Sekaligus Campuran RSUD Undata;
25. Reviu DAK Fisik Tahap 3 TA. 2023 pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air;
26. Reviu DAK Sub Bidang Pengembangan Food Estate pada Dinas CIKASDA : Pra Kontrak Tahun 2024;
27. Reviu DAK Sub Bidang Pengembangan Food Estate pada Dinas CIKASDA Tahap 1, 2 Tahun 2023,
28. Reviu DAK Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan pada DINKES Pra Kontrak, Tahap 1, 2 Tahun 2023
29. Reviu DAK Tahap 3 Reguler Sekaligus Campuran TA. 2023;
30. Reviu Kontrak dan Fisik TA. 2023;
31. Reviu Kontrak dan Fisik TA. 2023;
32. Pra Reviu dan Persetujuan Kontrak Dana Alokasi Khusus (DAK);
33. Reviu DAK Fisik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahap 3 TA. 2023;
34. Reviu DAK Fisik Dinas Kehutanan tahap 3 TA. 2023;
35. Reviu DAK Fisik tahap 1,2 TA. 2023;
36. Reviu RKPD Pemda;
37. Reviu RKPD Perubahan Pemda;
38. LPPD Pemda;

39. Reviu Mutasi, Rotasi dan Promosi ASN;
40. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
41. Reviu HPS (Pengawasan Proyek-Proyek Strategis);
42. Reviu HPS;
43. Reviu RKA OPD
44. Reviu RKA Perubahan OPD
45. Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak
46. Reviu KUA-PPAS;
47. Reviu LKPD;
48. Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah;
49. Reviu SSH/ASB/HSPK;
50. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP;
51. Pemeriksaan Pengaduan di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Lainnya;
52. Probitiy Audit;
53. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Morowali, Parigi Moutong;
54. Investigasi;
55. Pendampingan ke Kabupaten;
56. Pendampingan BPK, Itjen;
57. Evaluasi PMPRB;
58. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan MCP dan Saberpungli).

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke :				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62	64	66	68	70,05
		Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10,42% 5 (PD)	33,33% (16 PD)	41,67% (20 PD)	62,50% (30 PD)	100% (48 PD)
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,20)	Level 3 (Nilai 3,40)	Level 3 (Nilai 3,50)	Level 3 (Nilai 3,60)	Level 3 (Nilai 3,70)

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program/kegiatan/sub Kegiatan OPD. Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Visi	:	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi 2	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Menciptakan Birokrasi Instansi Pemerintah yang Bersih, Efektif, Profesional dan Melayani	Melakukan Fokus Perubahan minsed dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan public
				Perbaiki tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital
				Deregulasi kebijakan
				Peningkatan Profesionalitas SDM
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal	Efektivitas Pengawasan Intern
				Melaksanakan Evaluasi SAKIP terhadap seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja
				Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan
	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
				Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko
Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring Pencegahan tindak pidana korupsi				
Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP				
		Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.3.1
Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1.	Meningkatkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.545.865.548.00	30.194.760.049.00	1.648.894.501
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.310.000.00	31.310.000.00	00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000.00	16.000.000,00	00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.310.000.00	15.310.000.00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,229.092.111.00	18.644.753.813,81	(584.338.297,19)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.982.197.111.00	18.509.548.813,81	(472.648.297,19)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	246.895.000.00	135.205.000	(111.690.000)

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /SubKegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
2.	Meningkatnya nilaiSAKIP Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.301.375.000.00	2.388.787.500	87.412.500
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	97.750.000.00	87.150.000	(10.600.000)
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	2.109.114.500.00	2.168.977.500	59.863.000
		Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	94.510.500.00	132.660.000	38.149.500
		Penyelenggaraan Pengawasan	8.406.480.000.00	8.307.809.000	(98.671.000)
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.038.290.000.00	6.927.131.000	(111.159.000)
		Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah	3.114.319.00.00	3.092.431.000	(21.888.000)
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.726.281.000.00	1.852.770.000	126.489.000
		Reviu Laporan Kinerja	75.750.000.00	71. 700. 000	(4.050.000)
		Reviu Laporan Keuangan	278.560.000.00	263. 410. 000	(27.592.590.000)
		Kerjasama PengawasanInternal	8.550.000.00	-	(8.550.000)
		Pengawasan umumdan teknis Kab/Kota	531.226.000.00		(531.226.000)

	Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI danTindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	1.273.604.000.00	1.124.704.000	(148.900.000,00)
--	---	------------------	---------------	------------------

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.368.190.000.00	1.380.678.000	12.488.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90.000.000	90.000.000.	0,00
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.278.190.000.00	1.124.704.000	(153.486.000)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.044.851.500.00	890.043.500	(154.808.000)
		Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.500.000,	10.725.000,00	4.225.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.500.000,00	-	(6.500.000)
		Pendampingan dan Asistensi	1.038.351.500.00	890.043.500	(148.308.000)
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	268.632.000.00	216.366.000,00	(52.266.000)

	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	657.669.500.00	572.127.500	(85.542.000)
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	112.050.000.00	101.550.000	(10.500.000)

Tabel 2.3.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
		Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi	6.938.143.437.00	9.129.908.735	2.191.2765.298
1.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	45.945.000.00	70.945.000.00	25.000.000)
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	45.945.000.00	70.945.000.00	25.000.000
2.	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi UmumPerangkat Daerah	1.217.001.900.00	3.367.399.750.00	2.150.397.850
		Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	11.848.800.00	11.848.800.00	0,00

	Penyediaan Barang Cetakandan Peggandaan	64.421.100.00	91.973.950.00	27.552.850
	Penyediaan Bahan/Material	312.500.000.00	312.500.000.00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	828.232.000.00	2.951.077.000	2.122.845.000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	DPA Sebelum Perubahan (Rp.)	DPPA Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah/Berkurang
3.	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.140.555.000.00	3.017.142.700.00	515.272.846,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.140.555.000.00	3.017.142.700.00	515.272.846,00
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.140.920.537.00	2.004.863.237.00	65.522.403,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.826.437.00	508.551.137.00	23.041.653,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.694.094.100.00	1.496.312.100.00	42.480.750,00

5.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.666.000.00	669.558.048.00	436.498.515,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.800.000.00	149.800.00.00	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.850.000.00	85.850.00.00	-170.000,00
		Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1.094.016.000.00	433.908.048,35	

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai Berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Dengan Formulasi Komponen: 1. Pengungkit, yang terdiri dari: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td>a. Aspek Pemenuhan</td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td>b. Aspek Hasil antara Area Perubahan</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>c. Aspek Reform</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> </table> 2. Hasil, yang terdiri dari: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a. Akuntabilitas Kinerja dan Perubahan</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>b. Kualitas Pelayanan Publik</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>d. Kinerja Organisasi</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>		60%	a. Aspek Pemenuhan	20%	b. Aspek Hasil antara Area Perubahan	10%	c. Aspek Reform	30%	a. Akuntabilitas Kinerja dan Perubahan	10%	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	d. Kinerja Organisasi	10%	Evaluasi RB	Sekretariat dan Irban Khusus
	60%																				
a. Aspek Pemenuhan	20%																				
b. Aspek Hasil antara Area Perubahan	10%																				
c. Aspek Reform	30%																				
a. Akuntabilitas Kinerja dan Perubahan	10%																				
b. Kualitas Pelayanan Publik	10%																				
c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%																				
d. Kinerja Organisasi	10%																				
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Presentase Nilai SAKIP Persangkat Daerah dengan Kategori A	$\frac{\text{Jumlah OPD Nilai Sakip A}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Evaluasi SAKIP	Sekretariat, dan Irban Tiga																
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian maturitas Penyelenggara sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Formulasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Perencanaan Kinerja</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>- Pengukuran Kinerja</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>- Pelaporan Kinerja</td> <td style="text-align: right;">15%</td> </tr> <tr> <td>- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> </table>	- Perencanaan Kinerja	30%	- Pengukuran Kinerja	30%	- Pelaporan Kinerja	15%	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	BPKP	Sekretariat, Irban Satu, Irban Dua, Irban Tiga dan Irban Khusus								
- Perencanaan Kinerja	30%																				
- Pengukuran Kinerja	30%																				
- Pelaporan Kinerja	15%																				
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%																				

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel juga berorientasi pada hasil maka Pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan Perjanjian Kinerja guna mendukung berhasilnya Visi dan Misi Gubernur terpilih Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

2.5.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALIM, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

<p>PIHAK KEDUA,</p>  <p><u>Dra. NOVALINA, MM</u></p>	<p>PIHAK PERTAMA,</p>  <p><u>SALIM, S.Sos.,M.Si</u> Pembina Tingkat I, IV/b NIP.19721230 200012 1 004</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

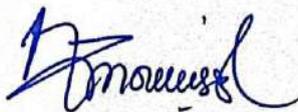
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 66
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	41,67 % (20 PD)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,50)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.30.194.760.049,16,-	APBD P
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.8.307.809.000,-	APBD P
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.890.043.500,-	APBD P
Jumlah	Rp. 39.392.612.549,16,-	

Palu, 11 November. 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**Plh. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. NOVALINA, MM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian capaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

3.1a Membandingkan Antara Target dan Realisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan capaian realisasinya seperti yang terlihat pada table 3.1.a yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.a
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi. (Indeks)	66	82,06	124,3	Sangat Tinggi
2.						
3.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A. % (PD)	41,67% (20 PD)	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP. (Level)	Level 3 Nilai 3,50	Level 3 Nilai 3,287	93,91	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 3 (Tiga) indikator kinerja tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Indeks Birokrasi Perangkat Daerah memiliki Target Indeks 66 di Tahun 2024 dimana realisasi berada pada Indeks 82,06 dengan capaian 124,3 %, interval realisasi kinerja sangat tinggi, hasil ini merupakan upaya kerja sama Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat sehingga mencapai kategori sangat tinggi perlu pertahankan dan di tingkatkan di Tahun 2025 dengan target Indeks melebihi 82,06 Birokrasi Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki Target sebesar 41.67% dengan Kategori A sebanyak 20 Perangkat Daerah pada Tahun 2024, akan tetapi masih menunggu hasil atau nilai SAKIP pada Tahun 2024. hal ini bertujuan untuk

meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selama ini hanya mencapai kategori B sehingga Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dalam hal peningkatan nilai atau capaian kategori Perangkat Daerah menuju kategori A hal ini dimulai pada Tahun 2024 sehingga target yang telah ditentukan diatas dapat pada tahun 2025 dicapai bahkan melewati dari target yang ditentukan yaitu sebesar 41,67 % atau sebanyak 62,50% Perangkat Daerah mendapat nilai A dengan selisih realisasi sebesar 16,35 % atau capaian sebesar 116,35 % hal ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga dari 50 Perangkat Daerah sisa 31 perangkat Daerah lagi yang perlu ditingkatkan nilai capaian melalui penguatan yang mana Perangkat Daerah yang masih bisa ditingkatkan dari segi nilai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- c. Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai salah satu daya dukung guna mencapai Reformasi Birokrasi yang ada di Perangkat Daerah khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maka dengan demikian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk dapat meningkatkan level maturitas SPIP di Perangkat Daerah sehingga Adapun hasil SPIP pada tahun 2024 dari penilaian BPK dari target yang ditentukan yaitu berada dilevel 3 (Nilai 3,50) dengan realisasi berada dilevel 3 (Nilai 3,287) dari nilai Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian Nilai 93,91 % namun tetap pada Level 3 dengan interval realisasi kinerja sangat tinggi. hal ini masih perlu ditingkatkan guna mencapai level yang lebih baik lagi untuk ke depannya



3.1.b Perbandingan Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian Indikator kinerja selama 3 (Tiga) Tahun kebelakang mulai dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 adapun perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.b
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian kinerja
Pada Tahun 2022 s/d 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya indeks reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Indeks	62	64	106,7	64	66	103,2	66	82,06	123,3
2	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan Kategori A	%	10,42% (5 PD)	18,79% (16 PD)	220	33,33% (16 PD)	38,78% (19 PD)	120	41,67 % (20 PD)	N/A	
3	Nilai Maturitas SPIP	Level Nilai	Level 3 (Nilai 3,20)	Level 3 Nilai (3,40)	106,3	Level 3 (Nilai 3,40)	Level3 (Nilai 3,2)	94,1	Level3 (Nilai 3,50)	Level3 (Nilai 3,287)	93,91

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut Dapat dilihat pada table 3.1.b Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3

(Tiga) IKU yaitu :

1. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dimana pada Tahun 2022 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada nilai 62, pada Tahun 2023 target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sebesar 2 point yaitu menjadi 64 dan pada tahun 2024 Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di targetkan Indeks Reformasi Birokrasi 66 dimana target ini naik 2 point dari Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 capaian Realisasi 123,3 %, hal ini bisa terjadi dengan komitmen bersama dalam hal Pengendalian Intern Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah
2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A
Dimana Pada target tahun 2024 hanya 20 (Dua Puluh) Perangkat Daerah yang dapat kategori A dengan target 41,67 % dari 48 Perangkat Daerah dan pada Tahun 2025 ada peningkatan Target 30 Perangkat Daerah yang mendapat kategori A sehingga pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menargetkan 30 (Tiga Puluh) Perangkat Daerah yang akan mencapai kategori A sehingga pada akhir evaluasi didapatkan 30 (Tiga Puluh) Perangkat Daerah yang mencapai kategori A dari target yang ditentukan hal ini akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan diakhir rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah SAKIP dengan kategori A mencapai 50 (Lima Puluh) Perangkat Daerah di tahun 2026.
3. Pada Tabel 3.1.b pada IKU ke 3 (Tiga) yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Pada Tahun 2022 Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya mencapai level 3 (Nilai 3,40) Joleh penilaian BPKP sehingga upaya meningkatkan terus dilakukan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta minimnya Anggaran yang tersedia sehingga menghambat capaian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah pada yaitu pada Tahun 2023 Nilai Maturitas SPIP masih dilevel yang sama yaitu Nilai 3,20 tidak mencapai target Pada tahun 2024 Nilai Maturitas SPIP masih dilevel yang sama yaitu dengan Nilai 3,287 dari segi nilai atau skor mengalami penurunan sebesar 0,32 sehingga Komitmen Inspektorat

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan capaian Nilai Maturitas SPIP dengan segala upaya pada Tahun 2025 bisa mencapai level 3,60 yakni naik sebesar 0.10 dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlunya integritas, komitmen dan kerjasamanya yang baik dalam meningkatkan level maturitas SPIP dimasa yang akan datang.

3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini, dengan Target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu memenuhi ekspektasi terhadap target dan capaian rencana strategis tahun 2022-2026 yang sudah ditetapkan. Kemajuan capaian sasaran strategis ini dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.c Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Relisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1.	Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan). Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,06	70,05	117,14
2.	Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah	% (PD)	N/A	100% (48 PD)	N/A
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Level	Level 3 Nilai (3,287)	Level 3 Nilai (3,70)	88,83

Pada tabel di atas dapat dilihat kemajuan capaian sasaran strategis Inspektorat ada beberapa Indikator kinerja utama yang melampaui dan serta mencapai target adapun indikator-indikator yang masih bisa ditingkatkan guna mempercepat mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 yakni 82,06 indeks tingkat kemajuan 117,14 % dari target 66 sesuai dengan target yang ditetapkan dimana naik 2 point dari Tahun 2023 Indeks, akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi

kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun 2025 dapat mencapai hasil dari target yang ditetapkan dgn jumlah Indeks 68 dengan komitmen Bersama.

2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kategori A hingga saat mencapai 19 (Sembilan Belas) Perangkat Daerah hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 33,33 persen menjadi 38,78 % hal ini tidak menutup kemungkinan pada Tahun 2024 Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat meningkat dengan signifikan mengingat Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah sudah memahami Tugas dan Fungsi Pokok Perangkat Daerah masing-masing sehingga dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah sehingga apabila melihat tabel diatas untuk mencapai 16 Perangkat Daerah Kategori A memerlukan 35,25 % sedangkan untuk dari total 50 Perangkat Daerah atau 100 % pada akhir masa renstra yaitu pada Tahun 2026, agar dapat mencapai target tersebut diperlukan Kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah dan Instansi terkait guna peningkatan kapasitas capaian kinerja masing- masing Perangkat Daerah.
3. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai kategori 3,287 dengan tingkat kemajuan 86,13 % sesuai dengan target Level 3 yang ditetapkan akan tetapi dengan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pencapaian realisasi kinerja guna menunjang kinerja Pemerintah Provinsi sehingga diharapkan pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai hasil atau target yang ditetapkan sebesar 3,60 hal ini sejalan dengan komitmen Bersama dalam hal Pengendalian Intern Pemerintah guna kesadaran Bersama untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perangkat Daerah melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Pada saat ini belum ada nilai persentase SAKIP di tingkat

Nasional mengingat pemeriksaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dilaksanakan setelah tahun berkenaan sehingga perbandingan realisasi untuk saat ini belum terpenuhi namun untuk nilai dari persentase Reformasi Birokrasi dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggunakan perbandingan dari Inspektorat Kota Yogyakarta. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi yaitu 82,06 dibandingkan dengan Inspektorat kota Yogyakarta yaitu 91,384 sehingga jumlah capaian 89,79 % dengan selisih jumlah capaian 9,324, tetapi dengan target Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah yakni 66 dengan realisasi 82,06 sudah memenuhi capaian yaitu 123,3%, namun perlu lagi ditingkatkan sehingga bisa bersaing dengan Provinsi Lainnya. Hasil capaian Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 3,287 dibandingkan dengan Provinsi Kota Yogyakarta yaitu 3,397 sehingga jumlah capaian 96,76 %, ada selisih jumlah capaian dengan provinsi Kota Yogyakarta sebanyak 0,11. Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan Provinsi Kota Yogyakarta dapat disajikan pada table dibawah ini :

**Tabel Perbandingan Capaian dengan Stansar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan). Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,06	91,384	89,79
2.	Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah	% (PD)	N/A	N/A	N/A
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Nilai Level	Level 3 (Nilai 3,287)	Level 3 (Nilai 3,397)	96,76

Pemerintah (SPIP)				
-------------------	--	--	--	--

3.1.e Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)."

Sasaran 1: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Perangkat Daerah menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengukur kualitas indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diukur pada 12 (dua belas) komponen penilaian sesuai bobot. Pada tahun 2024 hasil evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai 82,06 dengan melihat tersebut Inspektorat Daerah Provinsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 20,1 persen

Faktor Pendorong yang menjadikan tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah :

1. Adanya komitmen Pimpinan dalam menindak lanjuti hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Adanya pendampingan terhadap perbaikan Lembar Kerja Evaluasi Perangkat Daerah
3. Sosialisasi mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan pencapaian.

Dalam mencapai target pada Sasaran 1 (satu) ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi Akuntabilitas Internal merupakan bentuk segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas, hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan, nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi AKIP tingkat Akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kinerja memperoleh nilai sebesar 82,85 sehingga mendapat predikat A. Dengan hasil tersebut perlu adanya perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal berdasarkan rekomendasi seperti :

1. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.
2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan

akuntabilitas kinerja secara signifikan.

3. Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan reward and punishment kepada Perangkat Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Level maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Perkembangan Level Maturitas SPIP dimulai sejak Tahun 2021 dengan nilai 3,20. Pada Tahun 2022 dilakukan penilaian BPKP dengan hasil 3,40. Terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah menargetkan Level Maturitas SPIP sejak Tahun 2021 berada pada level 3 dengan tingkat kematangan terdefinisi hingga tahun 2026. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah pada akhir tahun 2024 mendapatkan predikat level maturitas SPIP Terintegritas pada level 3. Hal tersebut merupakan interpretasi dari TERDEFINISI yang artinya kebijakan/SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai terkait dan/atau unit kerja dilingkungan K/L/D serta bukti adanya implementasi kebijakan/SOP telah didokumentasikan dengan baik. Penilaian level ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari level 1 sampai level 5. Berdasarkan penilaian dan laporan oleh BPKP Pusat atas penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah untuk tahun 2024 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,287 dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,045 serta skor indeks Efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) sebesar 3,00.

Dalam mencapai target pada Sasaran 3 ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan:
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Pendampingan dan Asistensi.

Rekomendasi untuk menyusun rencana tindak terkait penerapan SPIP dan manajemen risiko, antara lain :

- 1) Membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko sesuai ketentuan baru yang melibatkan seluruh bidang;
- 2) Menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM terkait SPIP dan manajemen Risiko; dan
- 3) Menyusun analisa beban kerja pada OPD terutama menyangkut fungsi perencanaan, manajemen kinerja, dan tata kelola.

3.1.f Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran saat ini sudah memadai tetapi masih banyak tugas mandatori yang belum terakomodir ke dalam program /kegiatan/ sub kegiatan sehingga masih sangat kurang, hal ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terutama bagi pengambil kebijakan sehingga kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang lebih baik

Efisiensi Anggaran untuk penunjang IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sebagai Berikut:

Tabel. 3.1.f
Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5-8)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan). Indeks Reformasi Birokrasi	100	100	100	21.064.851.314	18.938.692.356	89,90	10,1
2.	Persentase Nilai Sakip Perangkat daerah	100	100	100	8.307.809.000	7.588.161.000	94,40	5.6
3.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	100	100	890.043.500	648.851.522	72,90	27.1

Dari table diatas dapat diasumsikan bahwa tingkat capaian efisiensi anggaran berdasarkan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu berada ditren positif sehingga capaian kinerja dengan efisiensi anggaran berjalan secara sesuai dimana target IKU yang ditetapkan mencapai target bahkan target persentase Nilai SAKIP Kategori A melebihi dari target yang ditentukan yang semula hanya 20 Perangkat Daerah menjadi 19 Perangkat Daerah.

3.1.g Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Pencapaian pernyataan kinerja dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah	Nilai	80	Rp 30.194.760.048	83	Rp 27.815.569.512	104	92,12
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	Rp 30.194.760.048	84,75	Rp 27.815.569.512	96	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 31.310.000	8	Rp 6.764.000	100	21,6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	2	Rp 19.229.092.111	2	Rp 16.818.641.220	100	90,21
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	Rp 70.945.000	1	Rp 63.800.000	100	89,93
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	Rp 2.388.787.500	1	Rp 2.113.286.636	100	88,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	Rp 3.367.399.750	4	Rp 3.201.562.375	100	95,08
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	Rp 3.017.142.700	1	Rp 3.013.080.000	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan	2	Rp 2.004.863.237	2	Rp 1.959.359.361	100	97,73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	Rp 669.558.048	1	Rp 639.075.420	100	95,45
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	77	Rp 8.307.809.000	74	Rp 7.588.161.000	95,81	91,34
			Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	88		100		113,64	
			Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	80		54		67,5	
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	87,18		85,00		97,5	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	167	Rp 6.927.131.000	162	Rp 6.425.160.000	97	92,75
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	27	Rp 1.380.678.000	30	Rp 1.163.001.000	111	84,23
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	Rp 890.043.500	3	Rp 648.851.522	100	72,90
			Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	0	-	-	-	-	-
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	6	Rp 890.043.500	6	Rp 648.851.522	100	72,90

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp. 39.392.612.549,16 total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan/Sub kegiatan sebesar Rp. 36.052.582.034,- (91,52 persen) sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.340.030.515,- (8,48 Persen).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiaya program / kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.2 berikut dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.194.760.049	27.815.569.512	95,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.310.000	6.764.500	21,60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	6.764.500	42,28
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.310.000	-	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.644.753.814	16.818.641.220	90,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18..509.548.813,81	16.684.311.200	90,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	135.205.000	134.330.000	99,35
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.960.000,00	63.800.000	89,93
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.945.000	63.800.000	89,93
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.388.787.500	2.113.286.636	88,47
	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	87.150.000	86.380.000	99,12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.168.977.500	1.926.325.676	88,81
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132.660.00	100.580.960	75,82
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.367.399.750	3.201.562.375	95,08
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.848.800	11.843.000	99,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.973.950	91.944.950	99,97
	Penyediaan Bahan/Material	312.500.000	312.400.000	99,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.007.000	2.785.374.425	94,39
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.017.142.700	3013.080.000	99,87
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.017.142.700	3.013.080.000	99,87
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.004.863.237	1.959.359.361	97,73
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.551.137	479.596.577	94,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.496.312.100	1.479.762.784	98,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.558.048	639.075.420	95,45

No.	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.800.000	136.346.506	91,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.850.000	70.326.914	81,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	433.908.048,35	432.402.000	99,65
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.307.809.000	7.588.161.000	92,75
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.927.131.000	6.425.160.000	91,40
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.092.431.000	2.826.635.000	91,40
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.852.770.000	1.771.620.000	95,62
	Reviu Laporan Kinerja	71.700.000	51.900.000	72,38
	Reviu Laporan Keuangan	263.410.000	254.610.000	96,66
	Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	0
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.124.704.000	1.047.474.000	93,13
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.380.678.000	1.163.001.000	84,23
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90.000.000	62.250.000-	69,17
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.380.678.000	1.100.751.000	85,28
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	890.043.500	648.851.522	72,90
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		10.725.000,00	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		10.725.000,00	100
	Pendampingan dan Asistensi	216.366.000	192.162.422	88,81
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	101.550.000	4.050.000	3,99
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	572.127.500	452.639.100	79,12
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-
	Jumlah	39.392.612.549,16	36.052.582.034	91,52

Dari tabel diatas dapat pula disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan capaian realisasi berjalan sesuai dengan target, realisasi dan capaian yang diinginkan yaitu capaian persentase mencapai 91,52 dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,48, hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya Komitmen Bersama, kerja sama dan peningkatan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan serta amanat Permendagri No. 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

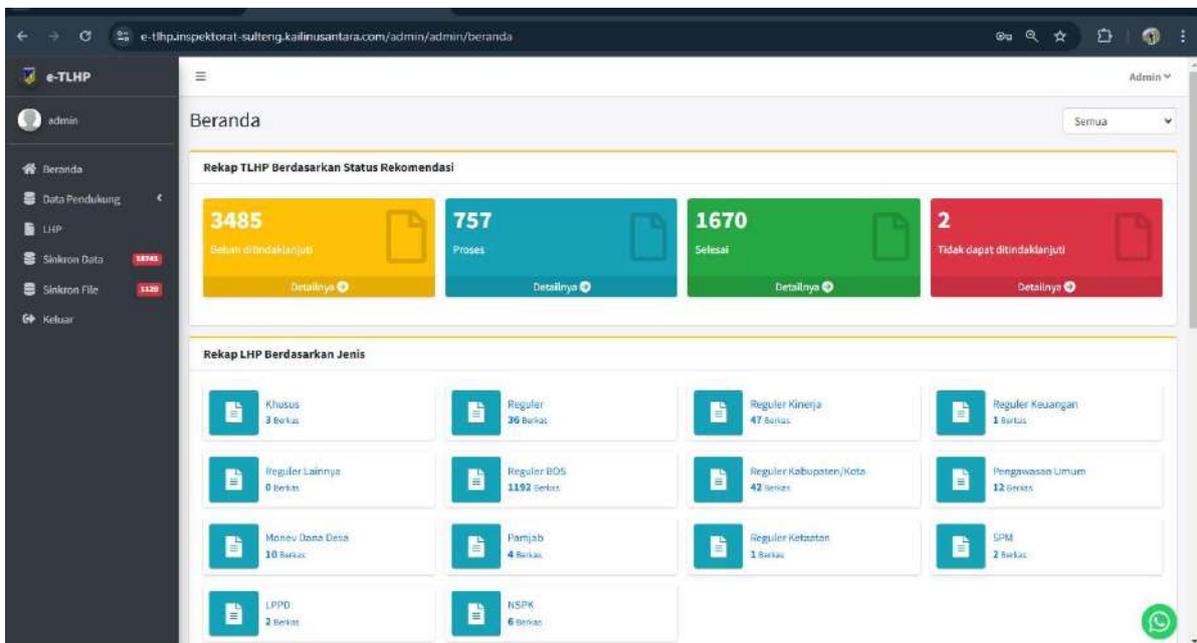
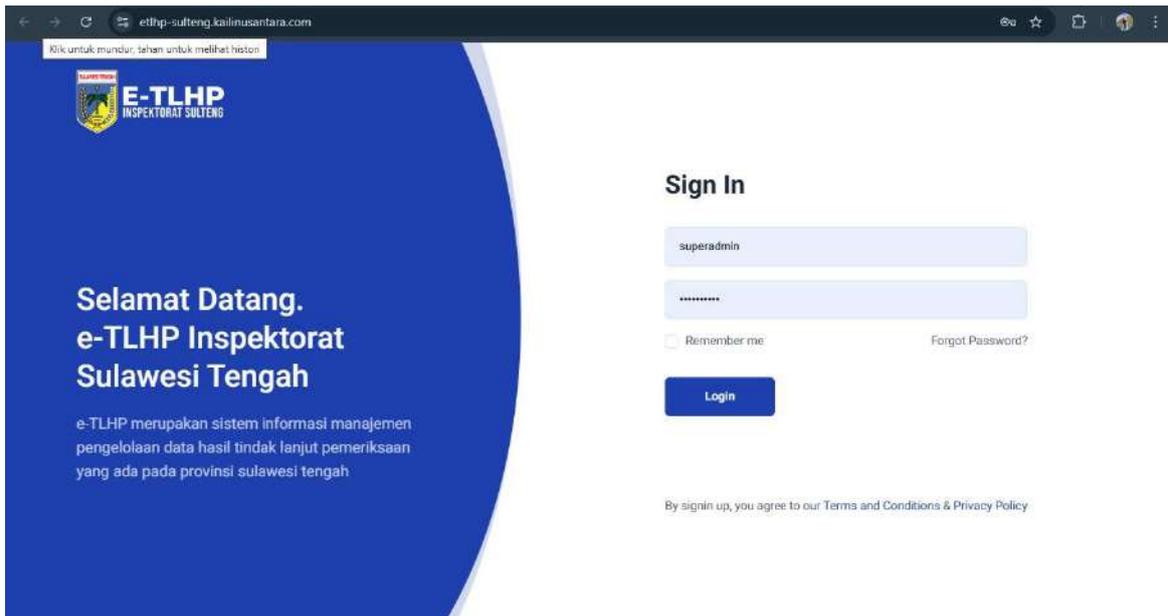
3.3 Inovasi

Dalam rangka Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dituntut untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik sehingga dalam rangka meningkatkan peran dan layanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam rangka menunjang pembinaan dan pengawasan sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiatif membuat terobosan dengan semakin majunya teknologi di era modern ini serta mengingat keterbatasan anggaran dan kemampuan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang belum memadai maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan Program e-Pengawasan dan e-TLHP aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk aplikasi e-Pengawasan ini yaitu semua pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan asset diupload di aplikasi e-pengawasan guna pembinaan dan pengawasan berkala secara berkesinambungan sehingga parameter pelaporan dan evaluasi oleh Inspektorat berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, Adapun aplikasi e-TLHP adalah aplikasi untuk Perangkat Daerah mengetahui apa saja temuan dan rekomendasi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah guna penyelesaian hasil pemeriksaan baik temuan BPK RI, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, maupun Insepktorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan penambahan fitur menu pelayanan untuk terhubung dengan Aplikasi SP4N LAPOR pada website resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat memfasilitasi/mengarahkan Masyarakat dalam penyampaian semua aspirasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Pengembangan Aplikasi e-TLHP akan diupdate sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

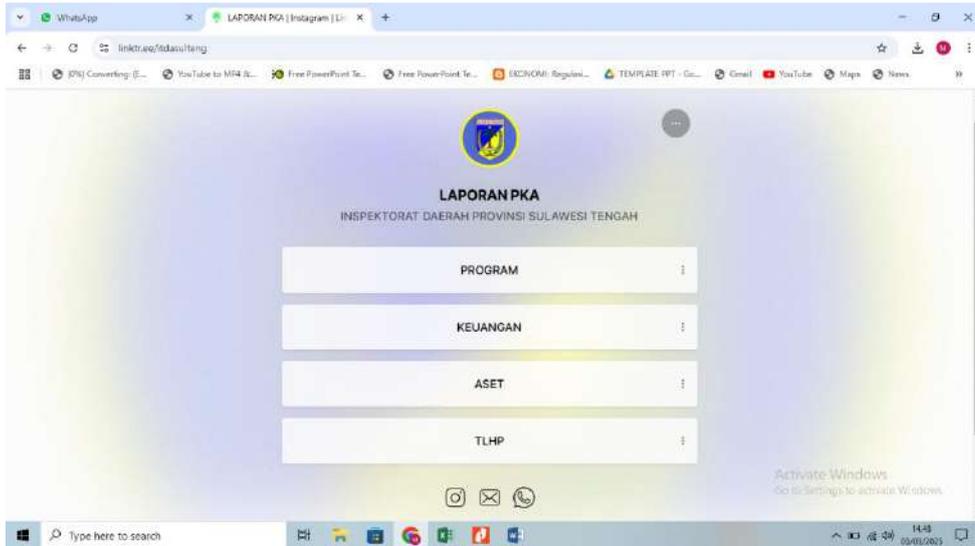
Dalam rangka melaksanakan tugas yang profesional dan berkinerja tinggi pada Tahun 2023 telah dibuat aplikasi PKA dimana setiap melaksanakan tugas

sesuai tupoksi hasil laporan dan data akan di input ke Link sehingga memudahkan untuk mencari laporan dan data apabila diperlukan dikemudian hari karena sudah tersimpan di Aplikasi PKA dan Pimpinan dapat memantau hasil dari data dan laporan tersebut.

Aplikasi E-TLHP



Linktree Laporan PKA



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (Dua) sasaran, dan 3 (Dua) indikator kinerja sasaran

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 3 (Ketiga) rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut masih ada yang belum mencapai target dan menemui hambatan sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas APIP di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai disebabkan formasi rekrutmen calon auditor dan PPUPD/aparat pengawas/pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang masih membutuhkan fungsional Auditor dan PPUPD/Aparat Pengawas, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja
2. Kurangnya keikutsertaan Auditor dan PPUPD untuk mengikuti Sosialisasi dan Diklat-diklat yang menunjang intuisi dari pada seorang Auditor dan PPUPD

tersebut, karena disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk peningkatan Sumber Daya dari Auditor dan PPUPD tersebut

3. Masih kurangnya perhatian dari OPD dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan baik itu pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri maupun temuan Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Masih kurangnya SDM ASN di Lingkup Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami Tugas dan Fungsi dalam menerapkan Kebijakan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah
5. Kurangnya fungsi pengawasan atasan langsung terhadap bawahan serta evaluasi kinerja secara berkala, terhadap hambatan tersebut diatas, perlu adanya penyelesaian yaitu:
 1. Komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan, serta pengusulan formasi rekrutmen pegawai menjadi fungsional auditor maupun PPUPD.
 2. Perlunya kerjasama antar stakeholder dalam hal Diklat / Bimtek guna Peningkatan SDM Fungsional Auditor maupun PPUPD
 3. Adanya komitmen dan perhatian para kepala PD dalam mempercepat proses penyelesaian temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan aparat pengawas internal dan membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang ada di PD
 4. Perlunya Penambahan Anggaran kepada Inspektorat dalam hal peningkatan SDM APIP
 5. Perlunya fungsi pengawasan tasan langsung terhadap mengontrol dan meminimalisir kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan dan anggaran yang dikelola

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitaskinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta adanya solusi dari permasalahan1(satu tahun kegiatan).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palu, 31 Januari 2025

**Pin, INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALIM, S.Soc., M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19721230 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**

Jabatan : Pjs. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,

SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 66
2.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori A	41,67 % (20 PD)
3.	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai 3,50)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.30.194.760.049,16,-	APBD P
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.8.307.809.000,-	APBD P
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.890.043.500,-	APBD P
Jumlah	Rp. 39.392.612.549,16,-	

Palu, 11 November 2024

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Pih. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**

Jabatan : **Plt. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

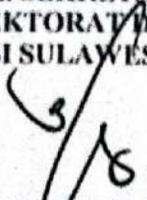
PIHAK KEDUA,

**Plh. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,

**Plh. SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina, IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai 80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks 88,50
		Persentase Realisasi Anggaran	98%
2.	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	79%
		Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri	90 %
		Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	85 %
3.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 30.194.760.049,16,-	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.214.704.000,-	APBD
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 572.127.500,-	APBD
Jumlah	Rp 31.981.591.549,16,-	

Palu, 30 November 2024

Plh. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

Plt. Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALIM, S.Sos., M.Si**

Jabatan : IRBAN WILAYAH I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

**Plh. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH I
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19721212 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	76,92 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.909.388.000,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 10.050.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.910.438.000,-	

Palu, 30 November 2024

Plh. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**SALIM, S.Sos., M.Si**
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004Irbani Wilayah I
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**SALIM, S.Sos., M.Si**
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19721212 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MAULANA AMIR M.SAINALLAH, M.Si**

Jabatan : IRBAN WILAYAH II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

**Plh. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH II
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


Drs. MAULANA AMIR M. SAINALLAH, M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19661231 199603 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	76,92 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

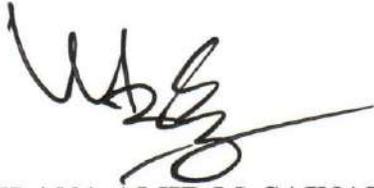
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.894.320.000,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 13.350.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.907.670.000,-	

Palu, 30 November 2024

Plh. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

Irban Wilayah II
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Drs. MAULANA AMIR M. SAINALLAH, M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19661231 199603 1 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATJO RIZAL, SH.,M.Si**

Jabatan : IRBAN WILAYAH III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : Plh. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

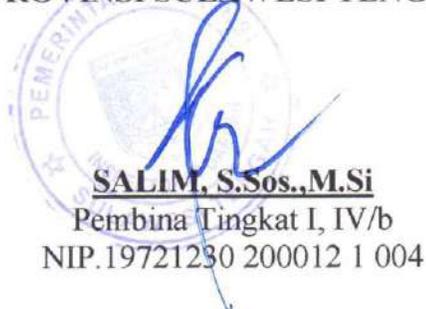
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

**Plh. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

PIHAK PERTAMA,

**IRBAN WILAYAH III
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ATJO RIZAL, SH., M.Si
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19701210 199803 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	76,92 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.705.096.000,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 45.750.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.750.846.000,-	

Palu, 30 November 2024

Plh. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

Irbani Wilayah III
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

ATJO RIZAL, SH., M.Si
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19701210 199803 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**

Jabatan : **IRBANSUS** Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SALIM, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **Plh. Inspektur** Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

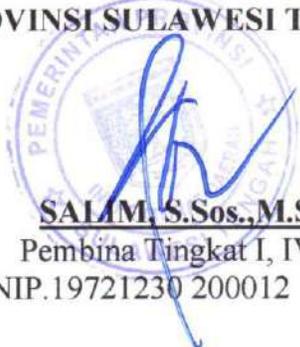
Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Plh. INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**IRBANSUS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SALIM, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004

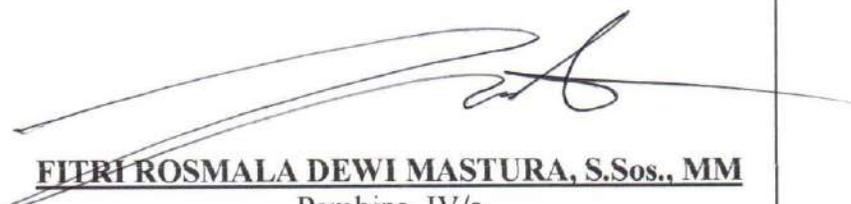

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19780420 201001 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	76,92 %
2.	Meningkatnya Capaian Level Kapabilitas APIP	Capaian level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.584.301.000,-	APBD
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 257.766.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 1.842.067.000,-	

Palu, 30 November 2024

Plh. Inspektur
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**SALIM, S.Sos., M.Si**
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19721230 200012 1 004Irbansus
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Pembina, IV/a
NIP. 19780420 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**

Jabatan : Plt. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

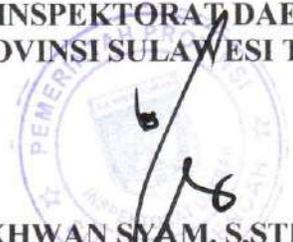
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

**Plt. SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
2.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	2 Dokumen
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/bln
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
3.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	- Tersedianya Bahan/Material	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
5.	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit
6.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
7.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	88 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	48 Laporan
	- Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	- Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan
	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33 Dokumen
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan
	- Terselesaikan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	8 Laporan
	- Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan
10.	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Laporan
	- Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi
11.	Terlaksananya Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	65 Laporan
	- Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 Perangkat Daerah
	- Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan
	- Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31.310.000	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.310.000	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.644.753.813.81	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 18.509.548.813.81	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 135.205.000	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 70.945.000	APBD
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 70.945.000	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.367.399.750	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 11.848.800	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 91.973.950	
	- Penyediaan Bahan/Material	Rp. 312.500.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 2.951.007.000	
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.017.142.700	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.017.142.700	
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.004.863.237	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 508.551.137	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.496.312.100	

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 669.558.048.35	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 149.800.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 85.850.000	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 433.908.048.35	
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.124.704.000	APBD
	-	Rp.	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 1.124.704.000	
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 90.000.000	APBD
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Rp. 90.000.000	
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 0	
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 0	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan	Rp. 0	
11	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 572.127.500	APBD
	- Pendampingan, asistensi, ferifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 0	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta ferifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 572.127.500	
	-	Rp.	
	Jumlah	Rp. 29.592.804.049,16	

Palu, 30 November 2024

Plt. Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan
Dan Aset Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI SARINTAN , S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si**
Jabatan : Plt. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 November 2024

PIHAK KEDUA,

**Plt. SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SRI SARINTAN , S.Sos., MM
Pembina. IV/a
NIP. 19801111 200112 1 003

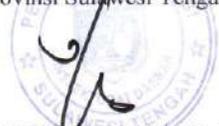
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang
	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	850 Orang

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		APBD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 87.150.000,-	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 2.168.977.500,-	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 132.660.000,-	
Jumlah	Rp. 2.388.787.500,-	

Palu, 30 November 2024

Plt. Sekretaris
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



IKHWAN SYAM, S.STP., M.Si
Pembina. IV/a
NIP.19801111 200112 1 003

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SRI SARINTAN, S.Sos., MM
Pembina. IV/a
NIP.19730106 199203 2 003

6	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Barang dan Jasa	Laporan	20	2.975.698.700	4	2.314.248.808	4	100%	1.217.001.900	3.367.399.750	-	0%	120.517.220	10%	-	0%	453.164.076	37%	-	0%	422.074.277	35%	4	100%	2.205.806.802	66%	4	3.201.562.375	8	5.515.811.183	100	95,08	40	185,36	Laporan telah dibuat	Membuat Laporan tepat waktu	
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	84.909.000	2	11.575.706	1	100%	11.848.800	11.848.800	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	11.843.000	100%	1	11.843.000	3	23.418.706	100	99,95	60	27,58	Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan rencana	Membuat rencana sesuai kebutuhan	
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	110.789.700	2	63.451.375	1	100%	64.421.100	91.973.950	-	0%	600.000	1%	-	0%	25.931.500	40%	-	0%	10.847.500	17%	1	100%	54.565.950	59%	1	91.944.950	3	155.396.325	100	99,97	60	140,26	Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan rencana	Membuat rencana sesuai kebutuhan	
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Paket	5	1.280.000.000	2	443.000.000	1	100%	312.500.000	312.500.000	-	0%	78.100.000	25%	-	0%	78.100.000	25%	-	0%	78.100.000	25%	1	100%	78.100.000	25%	1	312.400.000	3	755.400.000	100	99,97	60	59,02	Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan rencana	Membuat rencana sesuai kebutuhan	
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.500.000.000	2	1.796.221.727	1	100%	828.232.000	2.951.077.000	-	0%	41.817.220	5%	-	0%	349.132.576	42%	-	0%	333.126.777	40%	1	100%	2.061.297.852	70%	1	2.785.374.425	3	4.581.596.152	100	94,39	60	305,44	Laporan telah dibuat	Membuat Laporan tepat waktu	
6	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	5	1.432.796.029	1	2.258.362.751	1	100%	2.140.555.000	3.017.142.700	-	0%	597.300.000	28%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	2.415.780.000	80%	1	3.013.080.000	2	5.271.442.751	100	100	40	367,91	Laporan telah dibuat	Membuat Laporan tepat waktu	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	1.432.796.029	370	2.258.362.751	218	100%	2.140.555.000	3.017.142.700	33	15%	597.300.000	28%	-	0%	-	0%	-	0%	185	85%	2.415.780.000	80%	218	3.013.080.000	588	5.271.442.751	100	100	11760	367,91	Pengadaan Peralatan dan Mesin sesuai target	Memastikan Peralatan sesuai spesifik		
6	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	8.292.047.477	2	2.810.983.114	2	100%	2.140.920.537	2.004.863.237	-	0%	267.240.347	12%	-	0%	440.740.231	21%	-	0%	520.887.389	24%	2	100%	730.491.394	36%	2	1.959.359.361	4	4.770.342.475	100	97,73	200	57,53	Laporan telah dibuat	Membuat dokumen tepat waktu	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	1.837.774.100	24	685.200.237	12	100%	446.826.437	508.551.137	3	25%	29.781.797	7%	3	25%	157.441.631	35%	3	25%	114.183.378	26%	3	25%	178.189.771	35%	12	479.596.577	36	1.164.796.814	100	94,31	60	63,38	Laporan telah dibuat	Membuat dokumen tepat waktu
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	6.454.273.377	2	2.125.782.877	1	100%	1.694.094.100	1.496.312.100	-	0%	237.458.550	14%	-	0%	283.298.600	17%	-	0%	406.704.011	24%	1	100%	552.301.623	37%	1	1.479.762.784	3	3.605.545.661	100	98,89	60	55,86	Laporan telah dibuat	Membuat dokumen tepat waktu
6	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	2.596.670.120	2	854.656.850	1	100%	1.439.666.000	669.558.048	-	0%	-	0%	-	0%	32.511.442	2%	-	0%	27.984.580	2%	1	100%	578.579.398	86%	1	639.075.420	3,00	1.493.732.270	100	95,45	100	57,52	Laporan telah dibuat	Membuat dokumen tepat waktu	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	5	1.161.900.000	13	275.696.100	21	100%	149.800.000	149.800.000	-	0%	-	0%	4	19%	31.136.442	21%	10	48%	20.930.166	14%	7	33%	84.279.898	56%	21	136.346.506	34	412.042.606	100	91,02	680	35,46	Pelaksanaan pemeliharaan sudah dilaksanakan	Penyesuaian anggaran untuk memastikan alokasi sumber dana sesuai
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	308.890.000	74	113.496.750	64	100%	195.850.000	85.850.000	-	0%	-	0%	2	3%	1.375.000	1%	6	9%	7.054.414	4%	6	9%	61.897.500	72%	14	70.326.914	88	183.823.664	22	81,92	1760	59,51	Pelaksanaan pemeliharaan sudah dilaksanakan	Penyesuaian anggaran untuk memastikan alokasi sumber dana sesuai
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	15	1.125.880.120	2	465.464.000	4	100%	1.094.016.000	433.908.048	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%	432.402.000	100%	4	432.402.000	6	897.866.000	100	99,65	40	79,75	Pelaksanaan pemeliharaan sudah dilaksanakan	Penyesuaian anggaran untuk memastikan alokasi sumber dana sesuai

2	6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	83	8.400.823.000	65	9.036.203.675	77	77	8.406.480.000	8.307.809.000	-	0%	984.016.000	12%	74	74%	1.659.330.000	20%	74	74%	2.287.509.000	27%	74	74%	2.657.306.000	37%	74	7.588.161.000	138,86	7.588.161.000	95,81	91,34	167,30	90,33	Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Semester I karena Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Semester II belum dikeluarkan BPK	Meningkatkan Percepatan Tindak Lanjut	
								Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	%	94		92		88	88				0%			54	54%			55	55%			100	55%		100		191,50		113,64		203,72		Target Tercapai untuk Pemeriksaan 2024	Meningkatkan Percepatan Tindak Lanjut		
								Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	92		70		80	80				0%			53	53%			53	53%			54	54%		54		123,65		67,50		134,40		Capaian Per TW IV sudah melebihi 50% Target	Meningkatkan Percepatan Tindak Lanjut		
								Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	97,44		33		87,18	87,18			30,77	####			56,41	56%			58,97	59%			85	85%		85,00		118,33		97,50		121,44		Capaian Per TW IV sudah melebihi 50% Target	Meningkatkan Percepatan Tindak Lanjut		
	6	01	02	1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	2259	6.799.888.250	446	8.699.806.425	167	100%	7.038.290.000	6.927.131.000	36	22%	972.766.000	14%	38	23%	1.633.980.000	23%	42	25%	2.071.029.000	29%	46	28%	1.747.385.000	25%	162	6.425.160.000	608	15.124.966.425	97	92,75	27	222,43		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	240	228.242.964	174	2.000.111.690	74	100%	3.144.319.000	3.092.431.000	12	16%	176.100.000	6%	18	24%	659.140.000	21%	16	22%	1.068.545.000	34%	25	34%	922.850.000	30%	71	2.826.635.000	245	4.826.746.690	96	91,40	102	2114,74		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	960	228.242.964	365	2.589.993.625	33	100%	1.726.281.000	1.852.770.000	15	45%	650.330.000	38%	9	27%	686.200.000	40%	5	15%	160.750.000	9%	4	12%	274.340.000	15%	33	1.771.620.000	398	4.361.613.625	100	95,62	41	1910,95		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	03	03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Laporan	850	3.712.613.920	187	863.295.500	6	100%	75.750.000	71.700.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	17%	3.600.000	5%	5	83%	47.250.000	66%	6	51.900.000	193	915.195.500	100	72,38	23	24,65		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	04		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Laporan	40	241.598.378	200	1.350.348.450	12	100%	278.560.000	263.410.000	1	8%	8.400.000	3%	1	8%	9.600.000	3%	2	17%	53.250.000	19%	7	58%	183.360.000	70%	11	254.610.000	211	1.604.958.450	92	96,66	528	664,31		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	05		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	9	100%	531.226.000	522.116.000	3	33%	101.736.000	19%	-	0%	-	0%	5	56%	292.950.000	55%	1	11%	78.235.000	15%	9	472.921.000	9	472.921.000	100	90,58	-	-		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.01	06		Kesepakatan Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	4	255.000.000	2	444.191.535	1	100%	8.550.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	2	444.191.535	-	-	50	174,19		Pelaksanaan kesepakatan tidak dilaksanakan	merencanakan kesepakatan di tahun berikutnya
	6	01	02	1.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen	165	2.134.190.024	145	1.451.865.625	32	100%	1.273.604.000	1.124.704.000	5	16%	36.200.000	3%	10	31%	277.990.000	22%	13	41%	491.934.000	39%	4	13%	241.350.000	21%	32	1.047.474.000	177	2.499.339.625	100	93,13	107	117,11		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan
	6	01	02	1.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	90	1.600.934.750	9	336.397.250	27	100%	1.368.190.000	1.380.678.000	1	4%	11.250.000	1%	4	15%	25.350.000	2%	8	30%	216.480.000	16%	17	63%	909.921.000	66%	30	1.163.001.000	39	1.499.398.250	111	84,23	43	93,66		Laporan Belum dapat dibuat Karena Menunggu terbitnya SK dan Menunggu Pengawasan Dilaksanakan	Percepatan Pelaksanaan Pengawasan
	6	01	02	1.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	40	191.797.500	-	-	4	100%	90.000.000	90.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	50%	33.000.000	37%	1	25%	29.250.000	33%	3	62.250.000	3	62.250.000	-	69,17	7,50	32,46		Pembuatan Laporan Penyelesaian Kerugian	Membuat Laporan tepat waktu
	6	01	02	1.02	02		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	50	1.409.137.250	9	336.397.250	23	100%	1.278.190.000	1.290.678.000	1	4%	11.250.000	1%	4	17%	25.350.000	2%	6	26%	183.480.000	14%	16	70%	880.671.000	68%	27	1.100.751.000	36	1.437.148.250	117	85,28	72	101,99		Kegiatan yang telah direncanakan mengalami penundaan karena adanya kegiatan yang lebih prioritas	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan

3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APPIP)	Level	4	2.036.452.000	3	1.146.754.439	3	100%	1.044.851.500	890.043.500	3	100%	0%	3	100%	212.512.422	20%	3	###	161.877.850	15%	3	100%	274.461.250	31%	3	648.851.522	3	1.795.605.961	100	72,90	75%	86,17												
	6	01	03	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Laporan	5	111.615.000	1	132.301.900	0	0%	6.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1	132.301.900	-	-	20	118,53	Penghapusan anggaran di perubahan	merencanakan di tahun berikutnya										
	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rekomendasi	5	111.615.000	1	132.301.900	-	0%	6.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1	132.301.900	-	-	20	118,53	Penghapusan anggaran di perubahan	merencanakan di tahun berikutnya											
	6	01	03	1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	325	1.924.837.000	6	1.014.452.539	6	100%	1.038.351.500	890.043.500	-	0%	-	0%	2	33%	212.512.422	20%	2	33%	161.877.850	16%	2	33%	274.461.250	31%	6	648.851.522	12	1.663.304.061	100	72,90	4	86,41	Laporan telah dibuat	Melaksanakan Kegiatan Sesuai Target									
	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	240	602.178.527	48	607.223.925	49	100%	268.632.000	216.366.000	-	-	0%	24	49%	89.112.422	33%	15	31%	42.150.000	16%	10	20%	60.900.000	28%	49	192.162.422	48	799.386.347	100	88,81	20	132,75	Kegiatan sudah terealisasi (39 OPD terkait Evaluasi PMPRE)	Penyesuaian dan Percepatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan									
	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kegiatan	55	736.103.908	13	379.165.614	2	100%	657.669.500	572.127.500	-	0%	-	0%	1	50%	123.400.000	19%	1	50%	119.727.850	18%	-	0%	209.511.250	37%	2	452.639.100	15	831.804.714	100	79,12	27	113,00	Pelaksanaan Suber Pungli telah dilaksanakan	Melaksanakan sesuai Target								
	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Perangkat Daerah	30	586.554.565	2	28.063.000	2	100%	112.050.000	101.550.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3	150%	4.050.000	4%	3	4.050.000	5	-	-	3,99	-	-	Target pendampingan perangkat daerah melebihi target	Meningkatkan pelaksanaan pendampingan								
Jumlah								100	111.828.294.906	94,3	52.014.265.291	100%	100%	37.997.197.048	39.392.612.548	13,45			5.111.691.538	13,45%	21,70				8.246.990.344	21,19			8.052.439.390	21%	38,53			14.641.460.762	37%	91,52			36.052.582.034	185,84	88.066.847.325	9,152	94,88	185,84	78,75					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																		
Predikat kinerja																																																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																																		

Mengetahui:
Plh. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SALIM, S.Sos., M.Si., CGCAE
NIP. 19721230 200012 2 004

